



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016- 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu disusun indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 - 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun di Kabupaten Pacitan.
6. Instansi Pemerintah Kabupaten adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

10. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten.

11. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan Format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 30 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal: 30 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA					
MISI I : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel					
Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2		3	4	5
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima	1	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil survey IKM minimal baik	Perangkat Daerah dg hasil IKM baik dibanding jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan IKM	Sekretariat Daerah	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
	2	Pemeringkatan E Government (PeGI)	hasil penerapan terhadap pelaksanaan e-goverment di pemerintah kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Hasil Evaluasi Pemeringkatan e-Government
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	1	Opini BPK	opini BPK atas laporan Keuangan Daerah	Inspektorat	Dokumen LHE Audit BPK RI
	2	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretariat Daerah	Dokumen LHE Audit Menpan
	3	Nilai LPPD	Hasil Evaluasi LPPD	Sekretariat Daerah	Dokumen LHE Audit BPK RI

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA

MISI II : Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kehidupan Sosial Masyarakat

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2		3	4	5
Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Dinas Pendidikan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	2	Harapan lama sekolah	lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	3	Nilai rata-rata ujian:			
		- SD	rata-rata Nilai Akhir (NA) seluruh mata pelajaran dari semua sekolah dasar, Nilai Akhir merupakan gabungan dari Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional	Dinas Pendidikan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		- SMP	rata-rata Nilai Akhir (NA) seluruh mata pelajaran dari semua sekolah menengah pertama, Nilai Akhir merupakan gabungan dari Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional	Dinas Pendidikan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	1	Angka harapan hidup	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Dinas Kesehatan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	2	Angka kematian Ibu	Jumlah kasus kematian ibu hamil per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA					
MISI III : Membangun Perekonomian Masyarakat Dengan Menggerakkan Potensi Daerah Didukung Infrastruktur Yang Memadai					
Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2		3	4	5
Menguatnya kondisi perekonomian daerah	1	Laju pertumbuhan ekonomi	perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat	- Bappeda - Dinas Kominfo	Laporan Tahunan SKPD dan Data Statistik
	2	Tingkat inflasi	suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga barang-barang secara umum	- Bappeda - Dinas Kominfo	Lap. Tahunan Perangkat Daerah dan Data Statistik
	3	PDRB per kapita	nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut	- Bappeda - Dinas Kominfo	Laporan Tahunan Perangkat Daerah dan Data Statistik
Meningkatnya Kemandirian usaha mikro dan koperasi	1	Prosentase Koperasi mandiri	jumlah koperasi yang mandiri terhadap jumlah koperasi yang terdaftar	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	2	Prosentase Peningkatan Usaha Baru Wira	penambahan jumlah wira usaha baru terhadap keseluruhan jumlah wira usaha yang ada	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

Meningkatnya kinerja sektor industri	1	persentase pertumbuhan industri	penambahan jumlah industri baru terhadap keseluruhan jumlah industri yang sudah ada	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	1	Jumlah kunjungan wisatawan	jumlah wisatawan yang datang ke lokasi wisata di suatu wilayah kabupaten dalam satu tahun	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
Meningkatnya daya saing sektor pertanian	1	Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan perikanan	persentase kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	- Dinas Pertanian - Dinas Perikanan - Dinas Kominfo	Laporan Tahunan Perangkat Daerah dan Data Statistik
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	1	Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	ketersediaan energi/protein perkapita perhari dikali kandungan energi/protein dibagi 100	Dinas Pangan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	panjang jalan dalam kondisi baik dan nyaman untuk dilalui kendaraan dibanding jumlah keseluruhan panjang jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

	2	Persentase penduduk berakses air bersih	jumlah penduduk yang dapat mengakses air bersih dengan mudah dibanding dengan jumlah keseluruhan pendudukan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas lingkungan	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, dengan indikator yang digunakan antara lain: Indeks Kualitas / Pencemaran Air; Indeks Kualitas / Pencemaran Udara; Indeks Tutupan Hutan/Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA					
MISI IV : Meningkatkan Kesalehan Sosial Dan Harmonisasi Antar Seluruh Lapisan Masyarakat					
Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2		3	4	5
Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban	1	Jumlah konflik bernuansa SARA	Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan	- Sekretariat Daerah - Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	2	Angka kriminalitas	penanganan krininal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	3	Persentase penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban	jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan dibanding jumlah kejadian pelanggaran yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

— **BUPATI PACITAN**



INDARTATO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2016-2021

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

KOP SURAT SESUAI PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN PACITAN
NOMOR :/...../...../.....

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...nama PD...) KABUPATEN PACITAN

KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama PD.);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (...nama PD...) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama PD..) Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1.
2.
3.dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama PD...) Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU", merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh (...nama PD...) Kabupaten Pacitan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)(...nama PD...) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU", disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...nama PD...) Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: - - 2017

KEPALA (Nama PD)
Kabupaten Pacitan

.....
(Nama Lengkap dan Gelar)
(Golongan dan NIP)

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA (...PD..) KABUPATEN PACITAN
NOMOR TAHUN
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...PD...) KABUPATEN PACITAN

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (.....nama PD.....)

TUGAS :				
FUNGSI :				
KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	1			
	2			
	1			
	2			
	3			

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal : - - 2017

KEPALA (Nama PD)
 Kabupaten Pacitan

.....
 (Nama Lengkap dan Gelar)
 (Golongan dan NIP)

.....
BUPATI PACITAN

INDARTATO